BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

2.1.1. Gambaran Umum Perusahaan (Organisasi)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menggiring setiap bangsa dan negara di dunia pada kondisi global, persaingan yang ketat menjadi salah satu dampak yang tidak bisa dihindarkan (*conditio sine quo non*). Oleh karena itu persiapan disegala bidang dalam upaya menghadapi era tersebut juga menjadi sangat penting, baik untuk sektor publik maupun privat, baik yang menyangkut teknologi maupun sumber daya manusia.

Pada tahun 1969 Propinsi DT I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di Daerah yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 163 tahin 1969 tertanggal 16 Agustus 1969, dan badan ini merupakan embrio dari Badan Pembangunan di Daerah Jawa Barat

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan badan perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten

BAPPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat Regional dan Lokal dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Gubernur Propinsi Jawa Barat No 43 tahun 1972. Setelah berjalan dua tahun kedudukan Badan Perencana Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakuai dengan Surat Keputusan Presiden No 15 tahun 1974, walaupun Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih tetap berlaku Surat Keputusan Gubernur.

Kemudian dengan Surat Keputusan No 27 Tahun 1980 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Dati II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan No 27 tahun 1980, yaitu :

a. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sktoral dan pembangunan regional.

b. Untuk menjamin lajunya perkembangan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu

Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Dati II Bandung berdasarkan Perda No 21 tahun 1981, Perda No 24 tahun 1981

Seiring dengan diberlakukannya pasal UU. No 22 tahun1999 tentang pembangunan daerah, maka pemerintah kota Bandung menata kembali struktur organisasi perangkat daerah. BAPPEDA sebagai salah satu unsur organisasi perangkat daerah juga menata kembali struktur organisasinya termasuk merubah nama BAPPEDA Kotamadya Dati II Bandung menjadi BAPPEDA kota Bandung. Hal ini ditetapkan dengan Perda kota Bandung No 02 tahun 2001 tentang kewenangan daerah kota Bandung sebagai daerah otonomi, untuk struktur organisasi ditetapkan dengan Perda No 06 tahun 2001 tentang pembentukkan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kota Bandung, sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Perda No 17 tahun 2001 tentang perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi lembaga teknis kota Bandung.

2.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No 06 tahun 2001 tentang pembentukkan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kota Bandung, maka struktur organisasi BAPPEDA terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Manajemen Sistem Informasi, Seksi Telematika, Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi.

Sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dngan Peraturan Daerah No 17 tahun 2001 tentang perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi lembaga teknis kota Bandung.

maka Tugas Pokok Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai berikut:

1.Tugas Pokok

Badan perencanaan dan pemabangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintah kota, dibidang perencanaan pembangunan daerah

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi :

a. perumusan kebijakan umum dibidang pembangunan daerah
b. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang meliputi data dan statistik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial dan budaya, serta perencanaan fisik dan prasarana
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian Badan

2.1.3. Visi Dan Misi Organisasi

Adapun visi dan misi dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat dijadikan gambaran maupun inspirasi didalam membangun suatu organisasi, diantaranya sebagai berikut :

A. Visi

Berdasarkan visi Kota Bandung yaitu "Meningkatkan Peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa Tahun 2004 yang genah, merenah, tumaninah", kemudian secara jelasnya visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi Pemerintah Kota Bandung diantaranya adalah "mewujudkan aparatur Pemerintah Kota yang koordinatif, berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdayaguna, produktif, transparan dan bebas dari perilaku penyimpangan, yaitu melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi".

Untuk mewujudkan hal tersebut , Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kota Bandung menuangkan dalam perencanaan strategis, dengan visi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

"Bappeda Kota Bandung sebagai Badan Perencanaan terbaik di Propinsi Jawa Barat Tahun 2010".

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas produk perencanaan yang implementatif sebagai dewan pembangunan seluruh segmentasi masyarakat

2. Membangun organisasi yang efektif dan efisien
3. Memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia aparatur
4. maksimalisasi prasarana dan sarana pendukung
5. melibatkan segenap segmentasi atau kelompok masyarakat secara aktif dalam setiap proses perencanaan (*paricipatory planning*).

2.1.4. Tujuan Dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi melaksanakan misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
2. Terintegrasinya sistem Informasi secara cepat, tepat dan akurat.
3. Terbangunnya sistem jaringan.
4. Terwujudnya ketatalaksa- naan dan prosedur dalam pem bangunan dan pengembangan *SIMDA*

B. Sasaran

1. Tertatanya penyajian data dan sistem infor masi
2. Tersedianya Database Manajemen Sistem (DBMS).
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berbasis teknologi informasi.
4. Tersedianya sumber data dan informasi untuk pimpinan Daerah untuk pengambilan keputusan.
5. Tersedianya fasilitas untuk berkembangnya sistem informasi baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

2.1.5. Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran Organisasi (Strategi Operasional)

A. Kebijaksanaan Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung telah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan organisasi yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Adapun kebijaksanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penataan perangkat hardware dan software dalam rangka pembangunan SIMDA;
2. Pengembangan Relational Data Base Manajemen Sistem (RDBMS)

3. Peningkatan SDM aparat BAPPEDA dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BAPPEDA
4. Penataan sistem jaringan dalam rangka integrasi sistem informasi
5. Penataan Prosedur dan tahapan pengumpulan data dalam rangka pembangunan dan pengembang an SIMDA.

B. Program Operasional organisasi

Untuk melaksanakan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, maka program operasional Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :



1. Evaluasi dan inventarisasi data hardware maupun software
2. Evaluasi dan standarisasi sistem pelayanan data
3. Pendayagunaan aparatur Daerah
4. Penyusunan sistem jaringan
5. Penyusunan standar pengolahan data

C. Kegiatan Organisasi

Sebagai operasional dari berbagai program-program yang telah ditetapkan, BAPPEDA akan melaksanakan kegiatannya sebagai berikut :

1. Pembuatan Master plan pembanguan Data Base Manajemen Sistem (DBMS)
2. Pengadaan/upgrade perangkat hardware secara bertahap
3. Pengadaan licensi perangkat software secara bertahap
4. Pembuatan software Data Base
5. Migrasi data base kepegawaian ke data base server
6. Konversi data penggajian pegawai ke database engine "*oracle*"
7. Integrasi sistem informasi pengendalian dampak lingkungan
8. Pembuatan Software Sistem Informasi Eksekutif Keuangan (SIEK)
9. Pembuatan aplikasi Kas Daerah
10. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dibidang teknologi informasi
11. Pembuatan Jaringan Networking (*Backbone*)
12. Aplikasi sistem kolaborasi (e-mail, knowledge managemen dan workflow)
13. Pengembangan Jaringan Networking *backbone* untuk menambah *networking interface card* (untuk peningkatan kapasitas kondisi jaringan)

14. Pembuatan aplikasi sistem informasi Pemilu

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

2.2.1. Tempat

Tempat perusahaan dimana Peulis mengadakan Kerja Praktek yaitu berada di jalan Taman Sari No 76 Bandung.

2.2.2. Kedudukan

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang di bentuk berdasarkan Perda No 21 tahun 1981, Perda No 24 tahun 1981

Kemudian ditetapkan kembali dengan Perda kota Bandung No 02 tahun 2001 tentang kewenangan daerah kota Bandung sebagai daerah otonomi, untuk struktur organisasi ditetapkan dengan Perda No 06 tahun 2001 tentang pembentukkan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kota Bandung, sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dngan Perda No 17 tahun 2001 tentang perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi lembaga teknis kota Bandung.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, keberadaannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Untuk struktur organisasi ditetapkan dengan Perda No 06 tahun 2001 tentang pembentukkan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah kota Bandung.
b. Sedangkan untuk uraian tugas dan fungsi ditetapkan dngan Perda No 17 tahun 2001 tentang perincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi lembaga teknis kota Bandung.
c Ditetapkan dengan Perda kota Bandung No 02 tahun 2001 tentang kewenangan daerah kota Bandung sebagai daerah otonomi

2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan beberapa sub bagian dan sub bidang yaitu :

2.4.1 Sekretariat

Secretariat BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan badan perencnaan pembangunan daerah sekretariat membawahi :

a. Kepala sub bagian umum

   Kepala sub bagian umum membawahi staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan

b. Kepala sub bagian keuangan

   Kepala sub bagian keuangan membawahi staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang administrasi keuangan

c. Kepala sub bagian kepegawaian

   Kepala sub bagian kepegawaian membawahi staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang administrasi kepegawaian

2.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak terstruktur dan yang mempunyai keahlian spesifik. Dimana seharusnya BAPPEDA memiliki kelompok jabatan fungsional, tetapi karena sesuatu hal maka jabatan fungsional tersebut belum ada. Misalnya :

- Widya iswara (pengajar)
- Perencanaan
- Peneliti
- Arsiparis
- Pustakawan

2.4.3 **bidang data dan statistik membawahi beberapa sub bidang yaitu** :

a. Sub Bidang Data

   sub bidang data membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan statistik dibidang pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.

b. Sub Bidang Statistika

sub bidang statistika membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan statistik di bidang penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah

c. Sub Bidang Analisa dan Penilaian

sub bidang analisa dan penilaian membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan statistik di bidang analisa penilaian pembangunan daerah.

d. Sub Bidang Pelaporan

sub bidang pelaporan membawahi beberapa staf pelaksana yangbertugas melaksanakan sebagian tugas bidang data dan statistik di bidang pelaporan rencana dan hasil pembangunan daerah

2.4.4 Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya

a. Kepala Sub Bidang Kependudukan

kepala sub bidang kependudukan membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial budaya di bidang perencanaan pembangunan tentang kependudukan dan keluarga sejahtera

b. Kepala Sub Pidang Pemerintahan

kepala sub bidang pemerintahan membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian bidang perencanaan sosial dan budaya di bidang pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa

c. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

kepala sub bidang kesejahteraan rakyat membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial budaya di bidang perencanaan kesejahteraan rakyat dan kesehatan

d. Kepala Sub Bidang Pendidikan

kepala sub bidang pendidikan membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial budaya di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan agama

2.4.5 bidang perencanaan ekonomi

a. Kepala Sub Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

kepala sub bidang perindustrian perdagangan dan koperasi membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas perencanaan ekonomi di bidang pembangunan pariwisata

b. Kepala Sub Bidang Pariwisata

kepala sub bidang pariwisata membawahi beberapa staf pelaksanan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas perencanaan ekonomi di bidang pariwisata

c. Kepala Sub bidang Pengembangan Dunia Usaha

kepala sub bidang pengembangan dunia usaha membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas perencanaan ekonomi di bidang perencanaan pembangunan dunia usaha

d. Kepala Sub Bidang Pertanian

kepala sub bidang pertanian membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas perencanaan ekonomi di bidang pertanian

2.4.6 Bidang perencanaan fisik dan prasarana

a. Kepala Sub Sidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

kepala sub bidang tata ruang dan tata guna lahan membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan prasarana di bidang tata ruang dan tata guna lahan

b. Kepala Sub Bidang Perhubungan

kepala sub bidang perhubungan membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan prasarana di bidang perhubungan

c. Kepala Sub Bidang Lingkungan

kepala sub bidang lingkungan membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan prasarana di bidang lingkungan

d. Kepala Sub Bidang Sarana Dan Prasarana

kepala sub bidang pertanian membawahi beberapa staf pelaksana yang bertugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan prasarana di bidang sarana dan prasarana

2.5. Bidang pekerjaan divisi / departemen Kerja Praktek

Bidang pekerjaan / divisi Departemen Tempat Kerja Praktek yaitu pada bidang data dan statistik yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah serta pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.

2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi menggambarkan suatu kerangka ataupun bagan-bagan dalam suatu manajemen atau organisasi berisikan orang-orang yang mempunyai jabatan tertentu dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan terorganisir. Selain itu di dalam struktur organisasi ini dituntut kerjasama diantara masing-masing bidang sehingga akan terciptanya kebersamaan dan saling membantu didalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat pada lampiran.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM